

## Kemitraan Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat di Kota Makassar

<sup>1</sup>Nur Ikhsan,<sup>2</sup>St Nurmaeta,<sup>3</sup>Hamdan

<sup>123</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik,  
Universitas Muhammadiyah Makassar  
Makassar, Indonesia 90221  
Email : [nurikhsan@gmail.com](mailto:nurikhsan@gmail.com)

### Abstract

*The article discusses the partnership of local governments and non- governmental Organization in the Management of the House of Talent Homes in the City of Makassar. This type of research is qualitative where data is collected by observation, interview, and documentation and then analyzed descriptively qualitative. The informants in this study were 8 people. Partnership process carried out by the Office of Social Affairs and Non-Governmental Organization. In managing home of talent homes through several stages of partnership patterns, namely counter-productive predictions, where there is a bad communication that is constrained in educating Street Children, then a semi-productive partnership where the partnership pattern still seen carrying out their respective roles and function, the partnership aims to Educate persons with Social Welfare Problems to become trained and skilled social agents through several stages of partnership patterns to produce productive partnerships.*

**Key words :** Partnership, Local Government, Non-Governmental Organization

### Abstrak

Artikel ini membahas tentang Kemitraan Pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat Di kota Makassar, jenis penelitian ini adalah kualitatif dimana data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini 8 orang. Proses kemitraan yang dilakukan Dinas Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat, dalam pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat melalui beberapa tahapan pola kemitraan yaitu kemitraan kontra produktif, dimana pada terjadi sebuah komunikasi yang kurang baik sehingga terkendala dalam mendidik Anak Jalanan, selanjutnya kemitraan semi produktif yang dimana pola kemitraan masih terlihat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing, Kemitraan bertujuan untuk Mendidik Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar menjadi agen sosial yang terlatih dan terampil melalui beberapa tahap pola kemitraan sehingga menghasilkan kemitraan yang produktif.

**Kata Kunci :** Kemitraan, Pemerintah Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat

## **PENDAHULUAN**

Pertumbuhan merupakan salah satu dari dampak negatif pembangunan, khususnya pembangunan perkotaan. Termaksud di Dalam berkembang Kota Makassar disisi lain masih ada masalah sosial yang harus diperhatikan dan ditangani oleh pemerintah daerah yaitu mengenai permasalahan anak jalanan. Anak jalanan seperti halnya anak-anak lain, memiliki hak yang sama, yakni mendapatkan pengasuhan. dan pendidikan yang layak.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) UU No 35 Tahun 2014 perubahan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan : “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan, dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat”. Pemerintah daerah kota makassar telah megelurkan peraturan tentang bagaimana cara mengatasi masalah soasial yang di hadapai anak jalanan maka dibuatlah perda No 2 tahun 2008 yaitu tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di kota makassar sebagai dasar hukum untuk mengurangi jumlah anak jalanan itu sendiri, yang dimana dinas sosial kota makassar ebagai sektor terkemuka dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh anak jalanan.

Pemerintah Daerah Dinas Sosial Kota Makassar kini telah melaksanakan Perogram baru yaitu Rumah Hati Rumah Bakat (RHRB) tidak lepas dari konsep rumah sianggah yang dimana telah bermitra degan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial (LSM FPS) untuk menyelesaikan persoalan anak jalanan.

Melalui Perogram Rumah Hati Rumah Bakat (RHRB), para Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) yang terdiri dari anak jalanan, anak putus sekolah, pengangguran, dimana akan mendapatkan pembinaan berupa pengembangan bakat, sehingga membentuk kepribadian serta terbentuknya sebuah karakter yang mandiri. Dinsos Makassar akan mempersiapkan berbagai pelatihan keterampilan, antara lain bidang kesenian, pebengkelan, pendidikan dasar, dan menjahit agar menjadi agen sosial yang terampil dan terlatih.

Kemitraan menurut (Masturi, 2016) adalah hubungan kerjasama dari berbagai pihak, baik secara individual maupun kelompok. Dan oleh karena sifatnya yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut mahluk sosial. menurut (Fatmawati, 2011 ) Kemitraan dalam pelayanan public bahwa kemitraan diarahkan untuk mencapai tujuan diinginkan individu, kelompok, lembaga atau organisasi untuk Yaitu, : (1) adanya persamaan dan organisasi yang lebih landai. (2) mempunyai hierarki aktualisasi yang luwes (3) spiritualitas yang berbasis alamiah. (4) tingkat kekacauan yang rendah yang terbentuk dalam sistem. Dan (5) persamaan dan keadilan gender.

Menutut (Busmiati, 2017) telah mendeskripsikan pola kemitraan antara agar bagaimana dapat tencapai hasil kemitraan yang di inginkan yaitu (a). Pola tersebut terjadi apa bila perusahaan masih mengutamakan kepentingan shareholders dengan mengejar profit sebanyak-banyaknya. Sehingga perusahaan dapat meraup keuntungan secara maksimal, sementara hubungan dengan pemerintah dan kelompok masyarakat hanya pemanis belaka. Dimana perusahaan hanya berjalan

sesuai dengan targetnya sendiri yang ingin dicapai, sedangkan pemerintah juga tidak mau ambil peduli dan tidak adanya pengawasan yang efektif, sehingga masyarakat tidak punya akses apapun kepada perusahaan. Biasanya, perusahaan mengeluarkan biaya hanyalah digunakan untuk kepentingan orang-orang tertentu saja. Hal ini dapat dipahami, bahwa bagi perusahaan yang penting adalah keamanan jangka pendek saja. Di dalam konsep seperti ini, terkesan menggambarkan sebuah negatif. (b). Pola kemitraan semi produktif, Di dalam konsep ini sebuah perusahaan tidak mengetahui program-program pemerintah, yang dimana tidak adanya komunikasi antara pemerintah dan pengusaha dalam semua pembangunan dalam dunia usaha dan masyarakat hanya memposisikan dirinya yang bersifat pasif. Sehingga pemerintah dan komunitas masyarakat dianggap sebagai obyek dan masalah di luar perusahaan. Pola kemitraan seperti ini masih mengedepankan pada kepentingan jangka pendek. Dengan kata lain, kemitraan belum strategis dan masih mengedepankan kepentingan sendiri bukan kepentingan bersama antara perusahaan dengan mitranya. (c). Pola kemitraan produktif, Pola kemitraan ini menjadikan mitra sebagai subyek dalam menghasilkan sebuah pembangunan yang efektif. Pada pola ini dimana sebuah perusahaan mempunyai kepedulian sosial dan lingkungan yang tinggi, sehingga pemerintah memberikan fasilitator yang kondusif bagi dunia usaha dan masyarakat sangat antusias dan mendukung positif kepada perusahaan. Sehingga menghasilkan kepercayaan yang semakin tinggi antara satu sama lain, sehingga menghasilkan hubungan yang sinergis antara subyek-subyek dalam bermitra.

Menurut Hafsah dalam (Fadilah, 2011). Mengatakan terbentuknya suatu kemitraan yaitu strategi bisnis dalam bekerja sama oleh pihak tertentu melalui kontrak yang sudah ditentukan agar tercapainya tujuan yang ingin di capai sehingga menghasilkan keuntungan bersama baik yang bermitra maupun sebagai mitra. Hubungan sinergis Masyarakat bersama Pemerintah dan Swasta menjadi bagian penting dalam good governance. pemerintah diposisikan sebagai fasilitator, sedangkan tugas untuk pembangunan menjadi tanggung jawab seluruh komponen Negara termasuk dunia usaha dan masyarakat. Agar terbentuk kemitraan yang ideal antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan LSM. bentuk kemitraan pemerintah dan masyarakat, yang dimaksud adalah pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan didukung oleh pemerintah. (Sulaeman, 2014). (Melyanti,2014) mengemukakan bahwa, Kemitraan Masyarakat Dengan Pemerintah Daerah. Kemitraan masyarakat berperan membantu aparat untuk lebih memahami daerahnya dan menangkap peluang-peluang pengembangan yang tersedia bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kemitraan masyarakat tidak melihat bahwa pengembangan sebuah bantuan uang dari pihak luar, namun ia lebih menekankan kepada kerjasama antara berbagai pihak didalam wilayah kotamadya termasuk pemerintah. Yang bertujuan untuk memanfaatkan komponen sumberdaya, pemerintah, swasta, dan LSM, Pemerintah daerah yang memiliki akuntabilitas publik Akuntabilitas yang dimaksud yaitu sebagai kewajiban pemerintah daerah dengan segenap unsur birokrasinya dalam memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat menyangkut berbagai kegiatan pemerintah,

termasuk kinerjanya dalam pelayanan publik. dimana dalam melakukan kebijakanyang transparansi sesuai aturan-aturan hukum yang berlaku. Transparansi dalam pemerintahan yaitu dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengetahui berbagai aktifitas pemerintah daerah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat banyak.

Hubungan sinergis Masyarakat bersama Pemerintah dan Swasta menjadi bagian penting dalam good governance. pemerintah diposisikan sebagai fasilitator, sedangkan tugas untuk pembangunan menjadi tanggung jawab seluruh komponen Menurut Eldridge dalam (Sumarni, 2015) LSM dibagi berdasarkan kegiatan menjadi dua kategori yaitu (1). Kategori “pembangunan”, dimana sebuah organisasi yang telah memfokuskan perhatiannya pada sebuah program kemasyarakatan yang berbasis pemberdayaan dan pembangunan masyarakat baik dari segi kesehatan, pertanian, peternakan, kerajinan dan bentuk pembangunan ekonomi lainnya. (2). Kategori “mobilisasi”, sebuah organisasi yang memfokuskan perhatiannya pada pendidikan dan mobilisasi rakyat miskin yaitu membantu bagi orang tidak mampu, membantu sesama manusia apabila terkena musibah. Lembaga non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah lembaga yang berperandalampenegakan dan perlindungan hak-hak masyarakat atau hak-hak anak.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu tipe penelitian tentang bagaimana memberikan gambaran secara jelas dan diuraikan menjadi bentuk kata-kata sehingga

menghasilkan data yang aktual dan akurat mengenai data yang ada dilapangan. Jenis tipe penelitian adalah metode deskriptif kualitatif, dengan informan tujuh orang, teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen berupa metode observasi, ialah metode pengumpulan data dengan cara megamati dan mengadakan komunikasi dengan secara langsung dengan sumber informasi tentang kondisi penelitian.

Wawancara, metode yang digunakan dengan cara melakukan Tanya jawab atau percakapan dengan informan untuk memperoleh data, baik dengan menggunakan daftar pertanyaan atau percakapan bebas yang berhubungan dengan rumusan masalah yang sebelumnya telah dirumuskan.

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. dimana data hasil penelitian didapatkan melalui dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut dianalisis secara deskriptif diinterpretasikan pada informan dengan melakukan wawancara kemudian mengecek kembali data tersebut untuk memahami secara mendalam serta teori-teori yang sesuai dengan data tersebut yang dikumpulkan agar dapat menghasilkan penelitian yang bermutu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Busmiati (2016) membahas Dalam hal ini pola kemitraan yang digunakan dalam hubungan kerjasama Dinas Sosial dengan komunitas dalam program pembinaan anak jalanan adalah pola kemitraan kontra produktif. Hal ini dapat terlihat dari tidak adanya hubungan kerjasama antara Dinas Sosial dengan komunitas, walaupun selama ini secara

tidak langsung tugas Dinas Sosial untuk mengurangi anak jalanan di Kota Makassar terbantuan dengan adanya komunitas.

Begitupun yang terjadi pada saat ini awal dalam proses kemitraan Pemerintah Dinas Sosial Kota Makassar dan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial (LSM FPS) dalam pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat, yang dimanan mempunyai kendala dalam Pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat, yaitu dalam membangun Komunikasi yang baik sehingga terkendala dalam mendidik Anak Jalanan dalam peroses pembinaan di Rumah Hati Rumah Bakat, sehingga terlihat jelas dalam tahap awal proses pembinaan anak jalanan di Rumah Hati Rumah Bakat masih mementingkan kepentingan masing-masing, sehingga tahap awal dalam pengelolaan rumah hati rumah bakat yang dimana di lakukan oleh Pemerintah Dinas Sosial dan Lembaga Forum Peduli Sosial, masih mengguankan pola kemitraan kontra produktif. Anak jalanan di sebuah perkotaan menjadi salah satu masalah klasik yang dihadapi oleh pemerintah. Dengan dasar Undang-Undang 1945 pasal 34, “anak terlantar dan fakir miskin di pelihara oleh Negara” Anak adalah tumpuan harapan masa depan dan nasib bangsa yang akan datang, karena itu kualitas anak sangat ditentukan oleh proses dan bentuk perlakuan terhadap anak di masa kini. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Busmiati (2017) membahas Dalam hal ini pola kemitraan yang digunakan dalam hubungan kerjasama Dinas Sosial dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam program pembinaan anak

jalanan di Kota Makassar yang bisa dikatakan belum maksimal. Dinas sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hanya menjalankan peran dan fungsinya masing-masing.

Begitupun yang terjadi pada saat ini dalam tahap proses pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat Pemerintah Dinas Sosial Kota Makassar dan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial mempunyai kendala dalam Pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat, yaitu dalam tahap proses pembinaan yang berkelanjutan terhadap anak jalanan yang dibina dalam Rumah Hati Ruamah Bakat, saat ini Pemerintah Dinas Sosial Kota Makassar masih menjalankan tahap pembinaan, karena tidak adanya komunikasi yang jelas dari pemerintah tentang membahas pembinaan yang berkelanjutan terhadap anak jalanan di Rumah Hati Rumah Bakat, sehingga Forum Peduli Sosial menjalankan program yang ada dalam mengatasi masalah sosial yang di hadapi anak jalana. yang dimana tidak adanya komunikasi antara Pemerintah Dinas Sosial Kota Makassar Dan Lembaga Swdaya Masyarakat Forum Peduli Sosial dalam semua pembangunan yang berkelanjutan terhadap anka jalanan yang mendapatkan pembinaan di Rumah Hati Rumah Bakat. Pola kemitraan seperti ini masih mengedepangkan pada kepentingan jangka pendek. Dan selanjutnya dalam sebuah proses pengelolaan rumah hati rumah bakat dimana Pemerintah Dinas Sosial dan Lembaga Swadaya Masyrakat Forum Peduli Sosial masih terlihat menggunakan pola kemitraan semi produktif.

Berdasarkan Peraturan daerah No. 2 tahun 2008 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar, dijelaskan bahwa pembinaan dilakukan melalui

pembinaan pencegahan, pembinaan lanjutan dan rehabilitasi sosial. Pembinaan terhadap anak jalanan, gelandang, pengemis dan pengamen dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan dan menciptakan ketertiban serta ketentraman masyarakat dan menciptakan perlakuan yang adil dan proporsional dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat.

(Mahmudi, 2007) membahas dalam hal ini Kemitraan Pemerintah Daerah dan Efektifitas Pelayanan public Program kemitraan pemerintah daerah dengan pihak swasta dan sektor ketiga serta dengan pemerintah daerah lain merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan daerah dalam rangka mensinergikan pembangunan. Permasalahan masyarakat di daerah tidaklah mungkin diselesaikan sendiri oleh pemerintah daerah apalagi kalau hanya mengandalkan pada APBD saja. Pemerintah daerah dalam hal ini dapat menggunakan berbagai alternatif model kemitraan yang ada untuk mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan keajahteraan masyarakat.

Begitupun yang telah dilakukan Pemerintah Dinas Sosial Kota Makassar dan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial yang dimana mempunyai tujuan yang sama dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengatasi masalah anak jalanan, Dinas Sosial Kota Makassar tidak bisa mengatasi masalah sosial dengan sendiri sangat membutuhkan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial, dimana Pemerintah Dinas Sosial Memberikan Kepercayaan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial Mendampingi anak jalan yang terkena masalah hukum dan tindak kekerasan yang di hadapi oleh anak jalan, agar berjalannya perogram

pengelolaan Ruamah Hati Rumah Bakat yang selama ini ingin dicapai dalam bermitra, sehingga Pemerintah memberikan fasilitator yang kondusif bagi anak jalanan dan Lembaga Forum Peduli Sosial (LSM FPS) sangat antusias dan mendukung positif perogram Pemerintah. Sehingga menghasilkan kepercayaan yang semakin tinggi antara satu sama lain, dan menghasilkan hubungan yang sinergis antara subyek-subyek dalam bermitra. Masalah anak jalanan sudah lama ada, namun tidak pernah bisa tuntas ditangani, Pemerintah Kota Makassar sendiri kurang memiliki sumber daya manusia yang cukup Bagaimanapun juga pemerintah Kota Makassar memiliki kapasitas yang terbatas. Tidak semua permasalahan di masyarakat dapat diselesaikan, terlebih bagi pemerintah masalah anak jalanan tidaklah dianggap sebagai permasalahan yang krusial sehingga harus ditangani secara lebih mendalam. Untuk itu penting bagi pemerintah untuk bekerja sama dengan Lembaga Sosial. Walaupun keberadaan anak jalanan menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat, tidak semua warga Negara mampu dan mau untuk membantu mengentaskan masalah anak jalanan. Di Kota Makassar banyak lapisan masyarakat yang menaruh perhatian terhadap masalah anak jalanan. Melalui beberapa tahap proses kemitraan sehingga menghasilkan kemitraan produktif. program pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dalam upaya mengurangi bahkan menghapus anak jalanan itu sendiri bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial (LSM FPS), untuk menyelesaikan persoalan masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Makassar.

anak jalanan yang mendapatkan pembinaan di Rumah Hati Rumah Bakat dan diberikan pemahaman agar bagaimana cara menjalani hidup dan mendapatkan uang dengan cara yang baik, tanpa turun kejalan menjadi anak jalanan.

Hal ini menunjukkan bahwa anak jalanan merupakan salah satu sasaran pemerintah dalam program kesejahteraan sosial anak. Disebutkan pula dalam pedoman kesejahteraan sosial anak Kementerian Sosial RI, lembaga kesejahteraan sosial anak yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial anak bagi anak jalanan seperti rumah singgah, rumah perlindungan anak Dinas Sosial Kota Makassar sebagai bagian dari pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di Kota Makassar berperan penting dalam mengatasi masalah sosial yang terjadi terutama anak jalanan.

Forum Peduli Sosial adalah lembaga yang dimana telah bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam mengatasi masalah Sosial yang terjadi, keberadaan Forum Peduli Sosial untuk mengatasi masalah Sosial yang dimana tidak sepenuhnya bisa di atasi oleh Dinas Sosial maka Forum Peduli Sosial mempunyai peran dan dalam mengatasi masalah Sosial yang di hadapi anak jalan apa bila ada anak jalanan yang terkena masalah hukum seperti tindak kekerasan Forum Peduli Sosial siap mendampingi anak jalanan tersebut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, serta Forum Peduli Sosial melakukan pembinaan bagi anak jalanan dalam pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat, Lembaga Swadaya Masyarakat Form Peduli Sosial (LSM FPS) dibagi berdasarkan kegiatan menjadi dua

kategori yaitu: (1). Kategori pembinaan, dimana Lembaga Forum Peduli Sosial (LSM FPS) sebuah organisasi yang telah memfokuskan perhatiannya pada sebuah program kemasyarakatan yang berbasis pemberdayaan yaitu dengan cara membina anak jalanan yang berada di rumah hati rumah bakat yang bertujuan untuk menjadikan anak jalanan tersebut menjadi mandiri dan kreatif sehingga menghasilkan pembangunan masyarakat yang baik, baik dari segi kesehatan, pendidikan, kerajinan dan bentuk pembangunan ekonomi, dalam tahap proses pembinaan anak jalan LSM FPS dengan cara mendampingi dan mengajari anak tersebut dengan berbagai pilihan yang telah di tentukan sesuai dengan minat dan bakat anak jalanan tersebut, LSM FPS bekerja sama dengan Dinas Sosial dalam membina anak jalanan di Rumah Hati Rumah Bakat. (2). Kategori mobilisasi, dimana Lembaga Forum Peduli Sosial (LSM FPS) sebuah organisasi yang memfokuskan perhatiannya pada mobilisasi rakyat dalam tahap proses memobilisasi LSM FPS terlebih dahulu melakukan program pengaduan sosial, adanya program pengaduan sosial tersebut agar dapat mempermudah masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau masalah sosial yang dihadapinya.

Lembaga non-pemerintah seperti Lembaga Swadaya Masyarakat Form Peduli Sosial (LSM FPS) adalah lembaga yang berperan dalam penegakan dan perlindungan hak-hak masyarakat atau hak-hak anak. Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Form Peduli Sosial (LSM FPS) sangat penting, terutama yang memiliki perhatian terhadap anak jalanan. Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial (LSM FPS) menjadi mitra pemerintah dalam pembinaan dan pelayanan kepada anak jalanan. Lembaga

Swadaya Masyarakat (LSM) memiliki kepedulian terhadap masalah anak jalanan melalui layanan rumah singgah, yaitu Rumah Hati Rumah Bakat karena Rumah Hati Rumah Bakat merupakan salah satu wadah penyelesaian persoalan anak jalanan.

Hubungan sinergis Pemerintah Dinas Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial menjadi bagian penting dalam good governance. pemerintah diposisikan sebagai fasilitator, sedangkan tugas untuk pembangunan dalam proses pembinaan dan mobilisasi menjadi tanggung jawab Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial. Agar terbentuknya kemitraan yang ideal antara pemerintah Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial (LSM FPS), Sebagai konsep hubungan kemitraan, dilakukan sesuai dengan sifat serta kondisi dan tujuan sehingga menghasilkan sebuah usaha yang kondusif, baik di dalam pembinaan maupun pelaksanaan operasionalnya.

Dalam sebuah pembinaan dengan konsep kemitraan dipengaruhi oleh kebijaksanaan yang berlaku di wilayah tersebut, maka dari itu diperlukan sebuah dukungan serta kebijaksanaan mutlak dalam pelaksanaan kemitraan dengan melalui kontrak kerjasama secara konsisten mengikuti segala kesepakatan yang telah disepakati bersama, bentuk kemitraan pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial (LSM FPS) yang dimaksud agar bagaimana dapat Mendidik Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar menjadi agen sosial yang terlatih dan terampil pembangunan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan didukung oleh pemerintah.

## **PENUTUP**

### ***Simpulan***

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan dari kemitraan pemerintah Daerah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam penelolah Rumah Hati Rumah Bakat Di Kota Makassar, sebagai berikut:

Terlihat jelas dari hubungan kerjasama antara Dinas Sosial Lembaga dan Sosial Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial (LSM FPS) dalam program pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat di Kota Makassar yang bisa dikatakan dalam tahap proses awalnya masih menggunakan pola kemitraan kontra produktif, di akibatkan karena sebuah komunikasi yang kurang baik sehingga terkendala dalam mendidik Anak Jalanan, selanjutnya dalam proses bertahap dimana Dinas Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial (LSM FPS) masih menjalankan peran dan fungsinya masing-masing tidak adanya kordinasi yang jelas dalam proses pembinaan yang berkelanjutan bagi anak jalanan dalam hal ini pola kemitraan yang digunakan adalah pola kemitraan semi produktif. Karena banyaknya masalah sosial yang di hadapi anak jalanan maka dari itu Dinas Sosial Kota Makassar tidak bisa mengatasi masalah sosial dengan sendiri sangat membutuhkan kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial (LSM FPS), dimana Pemerintah Dinas Sosial Memberikan Kepercayaan Kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial (LSM FPS) Mendampingi anak jalan yang terkena masalah hukum dan tindak kekerasan yang di hadapi oleh anak jalan, agar berjalannya perogram pengelolaan



Ruamah Hati Rumah Bakat yang selama ini ingin dicapai dalam bermitra, sehingga Pemerintah memberikan fasilitator yang kondusif bagi anak jalanan dan Lembaga Forum Peduli Sosial (LSM FPS) sangat antusias dan mendukung positif program Pemerintah. Sehingga menghasilkan kepercayaan yang semakin tinggi antara satu sama lain, Sehingga menghasilkan hubungan pola kemitraan yang produktif.

#### **Saran**

Peroses kemitraan yang dilakukan Dinas Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial (LSM FPS) melalui beberapa tahapan pola kemitraan yang digunakan dalam hubungan kerjasama Dinas Sosial dan Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Peduli Sosial (LSM FPS) dalam program pengelolaan Rumah Hati Rumah Bakat tentang pembinaan anak jalanan yang bertujuan untuk Mendidik Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial agar menjadi agen sosial yang terlatih dan terampil yaitu melalui beberapa tahap pola kemitraan sehingga menghasilkan kemitraan yang produktif.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Busmiati, (2016). *Pola Kemitraan Dinas Sosial – Lembaga Sosial Dalam Program Pembinaan Anak Jalanan Di Kota Makassar*

Fadillah, Sri, (2011). *Evektifitas Pola Kemitraan Dalam Kerja Sama*

*Bank Muamalat Indonesia Mega Life cabang Syari'ah dalam Mengembangkan Sharia Mega Covers*

Fatmawati, (2011). *Kemitraan Dalam Pelayanan Pablik : Sebuah Penjelajahan Teoritik*, vol 1, No 2

Masturi, Beatrix, (2016). *Pola Kemitraan Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dan Pewujudan Mamasa Sebagai Destinasi Pariwisata di Sulawesi Barat*

Sulaeman, (2014). *Kemitraan Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Pengawasan Aktivitas Penambang Pasir Di Desa Buareng Kecamatan Kajuara Kabupaten Bone*

Mahmudi, (2007). *Kemitraan Pemerintah Daerah Dan Efektivitas Pelayanan Publik*, Jurnal Kajian Bisnis dan Manajemen, Vol. 9 No. 1

Melyanti, Merry Imelda, (2014). *Pola Kemitraan Pemerintah, Civital Society dan Swasta dalam Program Bank Sampah di Pasar Batu Kota Probolinggo*, Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol 3, No 1

Sumarni, (2015). *Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pencegahan Pengendalian, dan Penanganan Kasus Korupsi Di Kota Samarinda*, Jurnal Sosiologi, Vol 3, No 2